

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk cukup padat. Hasil riset yang dirangkum dalam data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia 5 (lima) periode ini semakin berjalan pesat. Hal ini dibuktikan pada tahun 2015 angka pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 255461.70 ribu jiwa dibandingkan dengan tahun 2010 hanya mencapai 238518.80 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik, 2016).

Dilihat dari sisi positif negatifnya, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi memberikan potensi bagi negara untuk meningkatkan jumlah produksi dalam mengembangkan ekonomi negaranya dengan ketersediaan jumlah tenaga kerja yang melimpah. Hal ini juga didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang handal dan memadai. Sebaliknya jika dilihat dari sisi negatifnya, pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan beban bagi pemerintah jika pertumbuhan penduduk tersebut tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam mencukupi kebutuhan hidup yang diharapkan.

Untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia khususnya kebutuhan primer mulai dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan merupakan unsur-unsur penting yang saling bersinambungan dan wajib dipenuhi dalam mencapai kesejahteraan manusia. Kebutuhan sandang merupakan kebutuhan manusia yang berupa pakaian layak pakai. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan makan dalam bertahan hidup dari kelaparan dan kehausan untuk menunjang kesehatan manusianya. Selanjutnya

adalah kebutuhan papan, kebutuhan papan merupakan kebutuhan manusia yang memerlukan tempat tinggal untuk melindungi dirinya dari sengatan matahari dan hujan serta tempat yang digunakan untuk tempat tinggal keluarga.

Penelitian ini lebih menekankan pada salah satu kebutuhan dasar manusia yang berupa kebutuhan papan atau lebih dikenal dengan kebutuhan konstruksi. Seiring dengan perkembangan jaman pertumbuhan sektor konstruksi berkembang secara signifikan. Hal ini didukung dengan kontribusi sektor konstruksi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tanah air yang tumbuh dari sekitar 7,07% di tahun 2009 dan menjadi 13 % pada tahun 2014 dan wacana yang terjadi pada tahun 2015 pasar konstruksi diproyeksikan tumbuh sebesar 14,26%. Sehingga pertumbuhan sektor konstruksi akan menjadi salah satu sektor paling menjanjikan berkat percepatan rencana pembangunan infrastruktur pemerintah (Badan Pusat Statistik, 2016). Tingginya pembangunan konstruksi menjadi sorotan pemerintah baik itu pada sisi perpajakan maupun sisi yang lain dalam menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Sebagaimana diberitakan bahwa pemerintah melakukan terobosan baru dalam meningkatkan penerimaan pajak di bidang konstruksi yaitu melakukan gerakan ekstensifikasi wajib pajak baru Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri atau biasa dikenal dengan PPN KMS (Jawa Pos, 2015).

Dalam realitanya, kemunculan kebijakan PPN KMS tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berbagai persoalan-persoalan yang sering dijumpai adalah kurangnya kesadaran akan adanya peraturan baru yang berhubungan dengan konstruksi yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Fenomena ini menjadi tradisi di berbagai pelosok daerah, salah satunya di daerah yang dikenal dengan Jembatan Suramadu yaitu kabupaten Bangkalan.

Bangkalan adalah salah satu daerah yang mulai menata dan mengembangkan sayapnya dalam meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerahnya, berbagai upaya dan tindakan mulai nampak di berbagai sisi sudut Bangkalan. Bergeliatnya pembangunan bangunan mulai ramai dan menjadi tren di masa kini. Hal ini dibuktikan dengan data IMB yang didapatkan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Bangkalan bahwa pembangunan bangunan dalam kategori PPN KMS tergolong cukup tinggi yaitu pada kisaran diatas 30 bangunan dalam proses pembangunan. Hal ini menjadi tolak ukur bagi pihak fiskus dalam memaksimalkan penerimaan PPN KMS di Kabupaten Bangkalan. Tabel 1.1 dibawah ini merupakan gambaran terhadap pertumbuhan bangunan dalam kategori PPN KMS di Kabupaten Bangkalan.

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan bangunan yang tergolong PPN KMS (rumah, ruko,**  
**gudang, dll) di Kabupaten Bangkalan**  
**Tahun 2011 hingga 2014**

| No | Tahun | Jumlah Pemilik Bangunan (Luas Bangunan $\geq 200 \text{ m}^2$ ) |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 2012  | 30                                                              |
| 2  | 2013  | 37                                                              |
| 3  | 2014  | 33                                                              |

Sumber: Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Bangkalan (data diolah, 2016)

Dibalik tingginya pembangunan bangunan dalam kategori KMS (rumah, ruko, serta gudang usaha) di Bangkalan tidak sebanding dengan tingkat penerimaan PPN KMS yang tergolong cukup rendah. Kabupaten Bangkalan, tahun 2013 wajib pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri yang terdaftar di KPP Pratama Bangkalan sebanyak 11 wajib pajak yang mencapai sebesar 176.964.918, dan setiap tahun dari tahun 2013-2015 penerimaan PPN KMS mengalami penurunan penerimaan pajak PPN KMS. Tabel 1.2 di bawah ini

dapat memberikan gambaran mengenai peningkatan dan penurunan penerimaan PPN KMS tahun 2012-2015 di Kabupaten Bangkalan.

**Tabel 1.2**  
**Tingkat penerimaan PPN KMS di Kabupaten Bangkalan**  
**Tahun 2012 hingga 2015**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Wajib Pajak PPN KMS</b> | <b>Penerimaan PPN KMS (Rp)</b> |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 2013         | 11                                | 176.964.918                    |
| 2014         | 22                                | 131.778.000                    |
| 2015         | 26                                | 102.405.940                    |

Sumber: KPP Pratama Bangkalan (data diolah, 2016)

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 diatas maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2013 hingga 2015, pertumbuhan jumlah wajib pajak PPN KMS dari tahun ketahun mengalami peningkatan tetapi berbanding terbalik pada penerimaan PPN KMS di KPP Pratama Bangkalan.

Adapun ada beberapa penelitian terdahulu yang pernah meneliti mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS), seperti yang dilakukan oleh Habrinama (2008), dimana dalam *Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Candi Sari* ditemukan bahwa pemungutan PPN KMS pada penggunaannya masih menggunakan *sistem self assessment* dan prosedur pembayarannya juga masih sederhana yaitu tidak menggunakan Surat Ketetapan Pajak, di lain sisi untuk meningkatkan penerimaan PPN KMS fiskus memiliki peranan yang sangat penting antara lain melakukan sosialisasi, membantu wajib pajak dalam menghitung besarnya PPN KMS, memberi teguran pada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya, dan mengadakan kerjasama dengan instansi lain dalam mengoptimalkan penerimaan PPN KMS.

Penelitian terdahulu yang kedua adalah dilakukan oleh Karima (2013), yang meneliti mengenai *Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri* dan hasil temuannya didapatkan bahwa pelaksanaan pengawasan penerimaan PPN KMS di KPP Batu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sedangkan penerimaan PPN KMS tahun 2011-2013 kontribusi termasuk dalam kriteria sangat kurang yakni kurang dari 10%.

Berdasarkan penelitian di atas dengan kasus yang terjadi, hal ini menjadi faktor pendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan tema yang sama yaitu PPN KMS. Walaupun ada beberapa persamaan dengan penelitian terdahulu, peneliti memunculkan sisi berbeda yaitu peneliti menguraikan secara terperinci dan detail (eksplikasi) akan peristiwa yang berhubungan dengan PPN KMS terdapat di Wilayah Kerja KPP Pratama Bangkalan. Perbedaan yang terakhir ada pada objek peneliti yang mengambil di KPP Pratama Bangkalan. Sebab pada objek penelitian ini merupakan daerah menjamurnya pembangunan bangunan yang melakukan kegiatan membangun sendiri di wilayah tersebut dan rata-rata luas bangunannya di atas 200 m<sup>2</sup>, baik itu digunakan untuk tempat tinggal maupun tempat usaha seperti kos-kosan maupun ruko (data IMB Bangkalan, 2016). Ternyata belum diketahui banyak kalangan masyarakat bahwa membangun bangunan akan dikenakan kewajiban membayar pajak yaitu kewajiban membayar PPN KMS, yang sebenarnya merupakan potensi bagus untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak PPN KMS. Fakta di lapangan tidak sebanding dengan penerimaan pajak PPN KMS yang diperoleh di KPP Pratama tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana implementasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan?

## **1.3 Batasan Penelitian**

Batasan penelitian ini penting untuk mencegah peneliti agar fokus dalam membahas pokok penelitian. Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti lebih menitik beratkan pada implementasi pemungutan PPN KMS di KPP Pratama Bangkalan serta peneliti akan memaparkan secara terperinci dan detail terhadap peristiwa yang berhubungan dengan PPN KMS di wilayah Kerja KPP Pratama Bangkalan.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi Universitas

Untuk menambah daftar referensi baru untuk akademisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS) yang selama ini belum banyak yang mengetahui terkait dengan peraturan baru yaitu PMK Nomor: 163/PMK.03/2012

2. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri

3. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memperluas wawasan berfikir, serta pemahaman atas ilmu-ilmu yang diperoleh selama kuliah dengan mengimplementasikan ilmunya ke dunia luar (lapangan).